

KONSEP DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Dedi Arianto

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Misbahul Ulum Gumawang
Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan
Email: dediarianto7@gmail.com

Abstract

The most valuable resource delivered through education in every area of life. State investment and capacity to manage the education system play a critical role in determining how far both can progress. This is intended so that by educating people, oppression will be fought and society will be free from social injustice, because social transformation is influenced by people's relations with educated people. Islamic education conceptually adheres to the fundamental principles of democracy which are intended to liberate human beings from all kinds of adversity and enable education to improve unjust social realities. Islamic education also pays attention to and is very tolerant of differences in one's background, whether related to race, belief, religion and social status.

Keywords: *Concept, Democracy, Islamic Education*

Abstrak

Sumber daya yang paling berharga disampaikan melalui pendidikan di setiap bidang kehidupan. Investasi dan kapasitas negara untuk mengelola sistem pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan seberapa jauh keduanya dapat maju. Hal ini dimaksudkan agar dengan mendidik masyarakat, penindasan akan dilawan dan masyarakat akan terbebas dari ketidakadilan sosial, karena transformasi sosial dipengaruhi oleh hubungan masyarakat dengan orang-orang terpelajar. Pendidikan Islam secara konseptual menganut prinsip-prinsip fundamental demokrasi yang dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari segala macam keterpurukan dan memungkinkan pendidikan memperbaiki realitas sosial yang tidak adil. Pendidikan Islam juga memperhatikan dan sangat toleran terhadap perbedaan latar belakang seseorang, baik yang berkaitan dengan ras, kepercayaan, agama dan status sosial.

Kata Kunci: *Konsep, Demokrasi, Pendidikan Islam*

A. Pendahuluan

Kata "demokrasi" berakar pada bahasa Yunani, di mana ia digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan langsung dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi negara yang ideal untuk penduduk negara kecil dan luas wilayah negara kecil. Istilah "demokrasi" kemudian menyebar ke seluruh dunia; pada kenyataannya, hampir semua negara di dunia memiliki bentuk pemerintahan yang demokratis karena lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sesuai dengan perkembangan zaman, ungkapan "demokrasi yang tumbuh" kini digunakan untuk merujuk pada semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk pemerintahan dan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, yang akan dibahas dalam artikel ini. Gagasan demokrasi pertama kali muncul sebagai hasil pemikiran tentang bentuk pemerintahan negara Yunani kuno, yang digunakan sejak abad keempat SM hingga abad keenam Masehi. Sistem pemerintahan demokrasi dilaksanakan secara langsung, artinya setiap warga negara menggunakan haknya untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Sifat langsung ini dapat dilakukan dengan sukses karena negara Yunani Kuno ada dalam keadaan langsung, dengan wilayah negara dibatasi pada kota dengan luas yang dapat dikelola dan keberadaan hanya sekitar 300.000 orang di satu negara¹.

Istilah "demokrasi pendidikan" juga digunakan dalam bidang pendidikan, dan mengacu pada gagasan bahwa proses pendidikan harus, dalam teori, ditentukan oleh prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, toleransi, dan kemajemukan. Oleh karena itu, jika ada masalah dalam suatu lembaga pendidikan yang tidak melibatkan salah satu stakeholder sehingga merasa dirugikan, maka secara otomatis akan berakibat pada tidak dilaksanakannya salah satu nilai demokrasi, dan hal ini akan mengakibatkan timbulnya masalah. di lembaga pendidikan yang disebabkan tidak terselenggaranya sistem pendidikan yang demokratis. Padahal, sejarah/demokrasi

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1981), h. 50

dalam ajaran Islam dan demokrasi secara umum tidak dapat dipisahkan dari keberadaan demokrasi dalam pendidikan Islam. Musyawarah, salah satu bentuk demokrasi dalam Islam².

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori dasar yang mengambil data dari bahan penelitian kepustakaan, setelah penulis membaca dan menganalisis buku atau jurnal yang relevan. Al-Qur'an dan beberapa tafsir yang berkaitan dengan judul penelitian menjadi sumber utama penelitian ini. sedangkan sumber data sekunder, seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang mencakup masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengolahan data menggunakan langkah deskriptif yaitu tahap yang menggambarkan sesuatu tentang masalah yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Hakikat Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" dan "*cratos*", *demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintah. Menurut Dede Rosyada meskipun istilah "demokrasi" memang muncul dan digunakan dalam kajian politik, artinya kekuasaan ada di tangan rakyat, namun mekanisme demokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme di lembaga pendidikan, tetapi secara fundamental, demokrasi membawa semangat pada pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, maupun evaluasi³. Ramayulis mengutip Sugarda Purbakawatja yang mendefinisikan demokrasi pendidikan sebagai ajaran pendidikan dimana setiap anggota masyarakat mendapat pengajaran yang adil⁴. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa demokrasi pendidikan merupakan cara pandang yang menjunjung tinggi kesetaraan peserta

² Daulay, Muhammad Roihan. "*Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam*." FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman 3.1 (2017): 91-110.

³ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004), h. 35

⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia 2015), h. 468-470

didik dalam hal kewajiban, hak, dan perlakuan oleh tenaga kependidikan selama proses pendidikan.

2. Demokrasi Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan demokrasi sebagai “sikap atau pandangan hidup yang menekankan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara⁵”. Demokrasi adalah pandangan hidup yang menekankan pada kecerdasan manusia dan cita-cita individu, membuktikan adanya interaksi sosial yang mencerminkan rasa hormat, kerja sama, dan toleransi antar individu serta tercapainya kesetaraan sosial dan tidak adanya perbedaan yang mencolok. Demokrasi dalam pendidikan ditunjukkan antara lain dengan memusatkan perhatian dan usaha kepada peserta didik dalam keadaan akal sehat dan sosial ekonomi. Pengelolaan pendidikan serta proses pendidikan yang berkesinambungan antara pendidik dan peserta didik tampak sebagai dua bidang di mana demokrasi pendidikan dipandang sebagai cara hidup yang menghargai perlakuan dan hak yang sama bagi semua individu⁶. Analisis demokrasi pendidikan dalam arti luas harus selalu berkonsentrasi pada bagaimana meningkatkan kehidupan sehari-hari dan terdiri dari tiga bagian, yaitu:

a. Menghormati Martabat Orang Lain

Gagasan ini mendasari demokrasi, yang dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin kesetaraan semua hak asasi manusia, tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, agama, atau kebangsaan. Nilai-nilai tersebut ditanamkan kepada siswa tanpa memandang perbedaan antar pribadi, baik itu dalam hubungan antar teman sekelas maupun antara siswa dengan guru yang saling menghargai dan menghormati

b. Setiap Manusia Memiliki Perubahan ke Arah Pikiran yang Sehat

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990, h. 195

⁶ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), 245-246.

Dari acuan tersebut maka sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat membantu siswa belajar berpikir kritis dan memecahkan masalah mereka sendiri secara tertib, sistematis, komprehensif, dan kritis. Ini akan memberi siswa wawasan, kemampuan, dan peluang luas. Tentu saja, pola pikir demokratis diperlukan dalam proses seperti ini, dan pendapat tentang orang lain tidak boleh dipaksakan kepada mereka. Filosofi pendidikan yang mendorong setiap orang untuk berpikir lebih jernih ini akan menghasilkan warga negara yang demokratis di negara yang demokratis.

c. Rela Berbakti untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Bersama

Demokrasi dalam konteks ini tidak berarti bahwa setiap orang terkekang oleh kepentingan orang lain. Atau, dengan kata lain, bahwa seseorang memperoleh kebebasan sebagai hasil dari orang lain yang menghormati kepentingannya. Oleh karena itu, warga negara demokrasi akan dapat dengan sukarela menerima pembatasan kebebasan, dan orang lain niscaya akan dapat merasakan kebebasan yang diterima setiap warga negara dari negara demokrasi yang berupaya menjamin kesejahteraan warganya. Hanya jika setiap individu dapat mengembangkan kemauan atau energinya untuk memajukan kepentingan bersama, kemakmuran dan kebahagiaan akan terwujud⁷. Demokrasi dibangun atas dasar persatuan dan kerjasama, selalu menggunakan diskusi dan musyawarah sebagai strategi masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dan pemerintahan sangat penting dan tidak dapat dipilih untuk mengejar tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan.

3. Demokrasi Pendidikan Islam

Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai dengan prinsip demokrasi Islam, atau dengan kata lain, prinsip demokrasi pendidikan Islam adalah penerapan prinsip demokrasi Islam. Pendidikan Islam bersifat demokratis dengan cara-cara berikut:

⁷ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), h.163-165.

a. Kebebasan bagi guru dan siswa

Di sini, kebebasan mengacu pada kemampuan untuk berkarya, mengembangkan potensi, dan mengungkapkan pendapat.

1. Kebebasan Berkarya

Al-Abrasyi berpendapat bahwa agar siswa dapat bebas memilih nasib mereka sendiri berdasarkan keterampilan mereka, pendidikan harus mengajarkan mereka untuk fokus pada kemampuan mereka sendiri dan memberikan mereka kebebasan untuk berpikir tanpa disibukkan dengan gagasan orang lain⁸.

2. Kemandirian dalam Pengembangan Potensi

Fitrah dibagi menjadi dua kategori oleh Nurcholis Madjid. Kategori pertama adalah sifat algharizah, yaitu potensi yang ada pada manusia sejak lahir yang meliputi akal, nafsu, dan hati nurani. Kedua, melalui potensi pendidikan, fitrah al-gharizah dibimbing dan diarahkan untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya oleh fitrah al-munazalah, potensi eksternal⁹. Ajaran Islam sebenarnya memberikan keleluasaan kepada anak didik untuk mengolah sifat-sifat kodrati yang telah ada dalam dirinya agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

3. Kebebasan berpendapat

Karena menghargai pendapat merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan pendidikan, maka pendidik harus menghormati pendapat peserta didik, dan peserta didik harus menghormati pendapat pendidik dan sesama peserta didik. Dalam hal ini pendidik menasihati dan membimbing anak untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang logis, bermoral, dan dikehendaki serta diridhoi oleh Allah SWT sesuai dengan tahapan perkembangan jiwanya. Jiwa siswa terbelenggu oleh kegagalan pendidik untuk menekankan pentingnya

⁸ Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Beberapa Pemikiran Pendidikan*, Terjemah Syamsudin Asyofi dkk. (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1996), h. 57

⁹ Nurcholis Madjid, *Islam ke-Moderenan dank e-Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1991), h. 8

kebebasan berpendapat, yang menyebabkan mereka mengalami emosi negatif seperti khawatir, kecewa, dan cemas selama proses belajar mengajar.

b. Tidak diskriminasi dalam belajar

Semua murid memiliki akses yang sama dan kesempatan belajar yang sama. Menurut Abuddin Nata, tidak ada perbedaan derajat atau martabat peserta didik yang masuk ke lembaga pendidikan karena pendidikan dilaksanakan di dalam kelas dengan maksud belajar dari guru. Anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah harus diajar bersama sehingga semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk belajar¹⁰. Tidak ada sistem sekolah unggulan dalam pendidikan Islam karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi pendidikan Islam dan memperlakukan murid secara tidak adil. Sistem pelayanan yang unggul ada dalam pendidikan Islam, dimana setiap peserta didik didorong untuk mencapai potensi maksimalnya. Semua siswa harus memiliki akses yang sama.

c. Pendidikan Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat individu

Orang harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan dalam masyarakat demokratis. Nabi Muhammad SAW menunjukkan nilai menghargai martabat individu secara historis dengan menyelamatkan budak dan orang tertindas lainnya di Mekkah. Tidak peduli dari mana siswa berasal, pendidik menghormati perspektif mereka selama proses pendidikan. Guru dapat mendorong siswa mereka untuk menghargai sudut pandang satu sama lain. Guru yang menghukum murid harus bersifat mendidik karena ini akan membantu membangun lingkungan belajar dan mengajar yang demokratis.

4. Implementasi Demokrasi Pendidikan Islam

Menurut Hasim Amir bahwa pendidikan Islam bersifat idealis, yaitu pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatis, dan kokoh berlandaskan

¹⁰ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 67

budaya yang kuat¹¹. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat Indonesia, tawaran Hasim Amir yang dikutip oleh A. Malik Fadjar dapat dijadikan contoh demokratisasi pendidikan Islam berikut ini¹²:

a. Pendidikan yang integralistik

Merupakan model pendidikan yang menitikberatkan pada unsur-unsur kehidupan, seperti pendidikan yang menekankan *rabbaniyah* (ketuhanan), *insaniyah* (kemanusiaan), dan *alamiyah* (alam pada umumnya) sebagai unsur-unsur yang diperlukan untuk mewujudkan *rahmatan lil alamin* dan kehidupan yang baik. Hal ini juga menekankan pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk dengan ciri-ciri fisik, spiritual, intelektual, perasaan, dan sosial-individual. Peserta didik yang berintegritas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhan, menyatu dengan diri sendiri sehingga tidak berkepribadian ganda dan menyatu dengan masyarakat secara keseluruhan merupakan hasil dari pendidikan integralistik. sehingga dapat menghentikan disintegrasi sosial, menyatu dengan alam untuk mencegah kerusakan, serta menjaga, memberdayakan, dan memaksimalkan potensi alam sesuai dengan tuntutan manusia. Artinya, pendidikan Islam harus berkembang dan diciptakan berdasarkan teologi ini. Dapat juga diklaim bahwa Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berangkat dari pemikiran ketuhanan.

b. Pendidikan yang humanis

Merupakan model pendidikan yang menekankan dan memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan kodratnya yang melekat, atau sebagai manusia. Oleh karena itu ia harus dapat memulai, mempertahankan, dan mengembangkan kehidupannya karena manusia adalah makhluk hidup. Untuk menghormati hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan secara adil, hak untuk mengkomunikasikan kebenaran, hak untuk mengungkapkan

¹¹ A. Malik Fadjar. *Reorientasi Pendidikan Islam* (Fajar Dunia, 1999) 37

¹² Romlah, Siti. "Demokrasi Pendidikan Islam." *Jurnal Studi Islam: Pancawahana* 13.2 (2018): 1-11.

kasih sayang, dan hak-hak lain semacam itu, pendidikan berperan dalam proses humanisasi. Pendidikan humanistik bertujuan mengembalikan fungsi dan peran manusia, mengembalikan manusia pada keadaan semula sebagai makhluk yang paling unggul. Dengan demikian, manusia yang “manusiawi” yang diciptakan oleh pendidikan humanistik diharapkan mampu membentuk manusia untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan cita-cita luhur kemanusiaan yang dapat menggantikan kecenderungan egoistis, individualistis dengan belas kasih kepada orang lain. sifat memberi dan menerima penghormatan, keinginan memberi dan menerima bantuan, keinginan untuk mengidentifikasi kesamaan, sifat menghormati hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan, dan lain sebagainya.

c. Pendidikan yang pragmatis

Pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang senantiasa membutuhkan hal-hal seperti pemikiran, emosi, aktualisasi diri, keadilan, dan tuntutan spiritual ketuhanan guna memelihara dan mengembangkan kehidupannya. Dengan demikian diharapkan model pendidikan pragmatis mampu melahirkan individu-individu pragmatis yang sadar akan kebutuhannya, peka terhadap masalah sosial dan kemanusiaan, serta mampu membedakan antara manusia dan keadaan yang tidak manusiawi.

d. Pendidikan yang mengakar pada budaya

Untuk mewujudkan manusia yang berkepribadian, bermartabat, dan percaya diri yang akan membangun peradaban berdasarkan budaya sendiri daripada budaya negara lain, diyakini model pendidikan yang dibangun dalam budaya akan mampu mewujudkan hal tersebut¹³. Namun, bukan berarti kita anti modern, anti perubahan, anti reformasi, atau menolak begitu saja arus luar revolusi budaya tanpa mengambil keputusan dan memberikan argumentasi yang meyakinkan. Rancangan model pendidikan Islam yang lebih praktis juga dapat dikembangkan dari keempat jenis tersebut di atas, yaitu: Menciptakan model

¹³ A. Malik Fadjar, 1999:37-39

pendidikan umum Islami yang amanah dan dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya adalah yang utama. Akibatnya, visi, misi, dan tujuan pendidikan, serta kurikulum dan bahan ajar, strategi pembelajaran, manajemen dan organisasi pendidikan, dan sumber daya pendidikan (guru dan tenaga administrasi), semua harus disesuaikan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam pendekatan pendidikan Islam yang luas, materi pendidikan umum dan agama diintegrasikan di seluruh kurikulum untuk mengembangkan intelektual Islam yang utuh. Meski Ahmad Syafii Maarif membantahnya, kita tidak perlu berteriak mengislamkan sains modern; sebaliknya, kita bisa menggunakan kata Fazlur Rahman, yang merupakan paradigma pendidikan sekuler saat ini, dan mengisinya dengan cita-cita Islam. Kedua, model pendidikan Islam yang tetap menitikberatkan pada pengembangan “pendidikan agama” seperti yang ada sekarang. Untuk menjawab tantangan perubahan, perlu dilakukan redesign model “pendidikan Islam” yang bermutu, yang meliputi: [1] merumuskan visi, misi, dan tujuan yang jelas; [2] memastikan kurikulum dan materi pembelajaran berorientasi pada kebutuhan siswa dan masyarakat; [3] menekankan pemecahan masalah; [4] menekankan manajemen berbasis sekolah; dan [5] memastikan bahwa lembaga pendidikan itu sendiri dikelola secara efektif. Pendidikan Islam dengan demikian akan mampu bersaing dengan mampu mendidik dan menghasilkan mujtahid yang ulet, berkualitas, dan bereputasi internasional dalam mata pelajarannya sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan nyata atau kekinian sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berubah. Menurut Fazlur Rahman, Alquran harus menjadi pusat intelektualisme Islam jika ingin mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas.

Ketiga, pendidikan agama Islam dipraktikkan di luar lembaga pendidikan formal daripada di dalamnya. Artinya, pendidikan agama berlangsung dalam bentuk pengajian, keterampilan beribadah dan kegiatan lain di rumah atau di lingkungan keluarga, masjid, dan lingkungan komunal (tempat pengajian dan masjid, misalnya). Orang tua dan masyarakat akan bertanggung jawab untuk

mendidik anaknya atau meminjam istilah Yahya Muhaimin, “pendidikan berbasis keluarga dan pendidikan berbasis masyarakat”. Dasar-dasar ini memungkinkan penanaman dan penyebarluasan pendidikan Islam secara intensif, menjadikan pendidikan agama diperlukan dan didasarkan pada kepribadian siswa. Oleh karena itu, kebutuhan dan perilaku aktual [afektif dan psikomotorik], daripada pengetahuan yang dihafalkan [kognitif] dan diuji secara intelektual, kini menjadi fokus belajar mengajar di lembaga pendidikan agama. Keempat, desain model pendidikan difokuskan pada dua dimensi, yaitu: [1] dimensi dialektis [horizontal], pendidikan harus dapat membantu siswa memahami bagaimana kehidupan manusia sesuai dengan dunia alam atau konteks sosialnya. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia harus mampu mengatasi hambatan dan keterbatasan lingkungannya, dan [2] dalam dimensi ketundukan vertikal, pendidikan selain sebagai alat untuk memantapkan dan memelihara sumber daya alam, juga berfungsi sebagai jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan abadi dengan Sang Maha Pencipta¹⁴. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan harus dibarengi dengan pendekatan yang berpusat pada hati, yang menyerukan pendidikan untuk membina hubungan antara individu dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan paradigma pendidikan Islam yang lebih demokratis yang mampu menghadapi kemajuan zaman modern yang berkembang dan berintegrasi dengan masyarakat madani Indonesia, maka keempat model pendidikan Islam tersebut di atas merupakan tawaran desain dan model yang patut diupayakan. Kecenderungan perkembangan jenis ini normal dan terjadi untuk mengantisipasi perubahan zaman. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat saat ini yang pragmatis dalam hal ambisi dan harapan terhadap pendidikan, sehingga pendidikan tidak statis atau hanya berlangsung di tempat mengingat isu-isu yang

¹⁴ Sudiro, M. Irsyad. "Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern." Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, Cirebon, Tanggal. Vol. 30. 1995.

dihadapi sepanjang era modern, pasca-modern, dan global. masyarakat. Oleh karena itu, terlepas dari model pendidikan Islam yang diberikan, ia terutama harus berfungsi sebagai jembatan antara peserta didik dengan nilai-nilai ketuhanan, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai demokrasi, serta masyarakat dan lingkungan sosiokulturalnya yang berubah dengan cepat. Hal ini karena pendidikan juga secara sadar digunakan sebagai alat perubahan sistem politik dan ekonomi secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Sepanjang sejarah Islam, Nabi Muhammad telah menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kebebasan, persamaan, permusyawaratan, kerja sama, toleransi, dan pluralitas untuk mempraktikkan demokrasi Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan. Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang telah menyatu dalam kehidupan umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, juga memuat segala nilai dan prinsip demokrasi. Dalam demokrasi pendidikan, nilai-nilai yang digariskan di sana dipraktikkan ketika suatu lembaga yang terdiri dari para pemangku kepentingan, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pimpinan lembaga pendidikan dan masyarakat, melaksanakan praktik dan program pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. tujuan yang sama yang dituangkan dalam visi dan misi lembaga. Pendidikan diharapkan mampu mendorong manusia menjadi pribadi yang aktif, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, produktif dan menghargai orang lain melalui upaya penerapan nilai-nilai demokrasi.

E. Daftar Pustaka

Al Abrasy, M. A. (1996). Beberapa Pemikiran Pendidikan, Terjemah Syamsudin Asyrofi dkk

- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Daulay, M. R. (2017). Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu Keislaman*, 3(1)
- Dede, R. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana.
- Fadjar, A. M. (1999). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Fajar Dunia.
- Fuad, I. (2005). *Dasar-dasar kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah, H. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Madjid, N. (1993). *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, cet. V. Bandung: Mizan
- Nata, A. (2000). *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pendidikan, D. (1990). *Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ramayulis. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia
- Romlah, S. (2018). Demokrasi Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, 13(2)
- Sudiro, M. I. (1995). Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern. In *Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, Cirebon, Tanggal* (Vol. 30)